

PERANAN MODAL SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BENDAR, KECAMATAN JUWANA, KABUPATEN PATI

Supratiwi

Abstract

The research was motivated by a policy of regional autonomy, which necessitates the decentralization to the village level. With so expected economic empowerment of rural communities that have an impact on the independence of rural communities. This is as seen in villages Bendar, Juwana district, Pati regency.

Therefore, the formulation of the problem in this study was to determine how the role of social capital in rural Bendar so that it can improve welfare. The method used in this study was a descriptive qualitative techniques of data collection through interviews and literature review.

The results showed that there were several social capital in Bendar village has a very large role in improving welfare in rural Bendar. Social capital, which is the first form of social trust (social aspects). Second, the values of hard work and perseverance (cultural aspects), the third form of economic organization formed by the community (economic aspects). Fourth, the role of women.

Keywords: Social Capital, welfare

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah meniscayakan desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasar prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000, kebijakan desentralisasi diikuti desentralisasi fiskal, dan anggarannya pun terus meningkat signifikan.

Tidak mengherankan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 22 Agustus, kembali menyampaikan bahwa, transfer dana dari pusat ke daerah meningkat lebih dari dua kali lipat, yang semula Rp 129,7 triliun (2004) menjadi Rp 292,4 (APBN-P 2008). Pada RAPBN 2009 transfer ditingkatkan lagi menjadi Rp 303,9 triliun. Namun, Presiden mengakui tidak optimalnya pembelanjaan di daerah melalui APBD. Akibatnya, pada APBN 2007 ada sisa anggaran yang amat besar, mencapai lebih Rp 45 triliun (<http://cetak.kompas.com>).

Peningkatan 134,3 persen transfer dana pusat ke daerah sejatinya mampu menguatkan ekonomi desa. Namun, transfer dana itu lebih banyak berhenti pada lingkaran elite pejabat di daerah. Para pejabat di daerah menganggap pemerintahan desa adalah bawahan bupati. Segala kebijakan desa diatur oleh pemerintahan daerah sehingga desa tidak dianggap sebagai pemerintahan yang otonom (Rozaki dkk; IRE dan FF, 2004 dalam <http://kompas.com>). Padahal, desa adalah pion terdepan dalam peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat. Pemerintahan desa seyogianya mampu mangagregasi dan mengatalisasi aspirasi rakyat, terutama dalam rangka merangsang rakyat dalam partisipasi publik.

Menurut data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT; 2008), terdapat 38.232 (54,14 persen) kategori desa maju, yang terdiri dari 36.793 (52,03 persen) kategori maju dan 1.493 (2,11 persen) kategori amat maju. Sementara itu, desa tertinggal berjumlah 32.379 (45,86 persen) yang terdiri dari 29.634 (41,97 persen) kategori tertinggal dan 2.745 (3,89 persen) kategori amat tertinggal (<http://www.kompas.com>)

Karena itu penguatan otonomi desa dengan manajemen pemberdayaan dan penguatan masyarakat desa melalui peningkatan peran modal sosial dan partisipasi masyarakat sudah seharusnya dilakukan. Dengan begitu diharapkan terjadi penguatan ekonomi masyarakat pedesaan yang berdampak pada kemandirian masyarakat desa.

Demikian pula yang terjadi di desa Bendar, kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Jika wilayah pesisir pada umumnya identik dengan kemiskinan, maka desa Bendar sebaliknya mencerminkan kemakmuran yang merata.

Di desa itu nelayan tak tinggal di gubuk reyot, tapi di rumah-rumah seperti istana: gedung dua lantai bahkan lebih, pilar-pilar tinggi, lantai berlapis marmer, dan atap genteng beton. Bahkan ada rumah dilengkapi kolam renang. Penguatan ekonomi masyarakat desa tersebut dimulai pada era reformasi (tahun 1990-an) ketika desentralisasi diberlakukan. Sebelumnya kondisi desa Bendar tak beda dengan desa-desa lain: kumuh, dan miskin.

Hal tersebut tidak terlepas dari peranan modal sosial yang ada di dalam masyarakat yang membuat masyarakat desa bersedia berpartisipasi dalam pembangunan di desanya. Karena itu anggapan yang mengatakan bahwa pembangunan hanya butuh modal ekonomi dan modal fisik semata tidaklah tepat.

Fenomena tersebut menarik perhatian untuk dilakukan penelitian di desa Bendar, sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana peranan modal sosial yang ada di desa Bendar sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang berupaya mengungkap fenomena sosial politik dengan jelas dan cermat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Informan mencakup masyarakat desa dan perangkat desa Bendar.

B. PEMBAHASAN

Pada era otonomi daerah ini partisipasi masyarakat menjadi unsur penting keberhasilan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah maupun di tingkat desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Madekhan Ali, bahwa Otonomi Desa adalah kemandirian pemerintahan dan masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi, merencanakan kegiatan, menggali dana, mendanai pembangunan, dan mengontrol kegiatan pembangunan desa. (2007:97). Karena itu keberadaan modal sosial didalam masyarakat harus didayagunakan dan dioptimalkan. Karena sesungguhnya dalam setiap masyarakat pasti memiliki modal sosial hanya saja sudah lama tidak difungsikan karena sistem sentralisasi yang dianut Orde Baru mengharuskan segala sesuatu harus mengikuti apa yang berasal dari pusat.

Hanifan mendefinisikan modal sosial sebagai kenyataan yang dimiliki warga, dapat berupa kehendak baik, simpati, persahabatan, hubungan sosial antar individu & keluarga yang dapat membantu mengatasi persoalan warga masyarakat. Dalam konteks demikian, hubungan yang baik antar anggota masyarakat menciptakan jaringan yang bersifat mutualis, dan bahkan mengalahkan individualitas, yang biasanya melingkupi karakteristik budaya barat. Dengan kata lain, jika seseorang mengalami persoalan & tidak mampu mengatasinya sendiri, warga tersebut dibantu warga lainnya secara sukarela. Dengan hubungan sosial yang erat; pola polarisasi, pengkotak-kotakan, dan pembilahan sosial menjadi luntur (Gunawan, 2005:386)

Lebih jelas lagi Robert D. Putnam (1993:167) menyatakan komponen modal sosial terdiri dari kepercayaan (*'trust'*), aturan-aturan (*'norms'*) dan jaringan-jaringan kerja (*'networks'*) yang dapat memperbaiki efisiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang terkordinasi. Lebih lanjut dikatakan Putnam bahwa kerjasama lebih mudah terjadi di dalam suatu komunitas yang telah mewarisi sejumlah modal sosial dalam bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik dan jaringan-jaringan kesepakatan antar warga. Modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan tersebut merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi, dan prasyarat mutlak bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif (Kushandajani, 2008:26). Dengan demikian modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan. Hal ini lah yang coba akan dilihat pada masyarakat desa Bendar. Kemajuan dan kesejahteraan yang dicapai tidak terlepas dari keberadaan modal sosial yang mereka miliki. Lalu bagaimana peranan atau seperti apa peranan modal sosial didalam menyejahterakan masyarakat Bendar?

Dari hasil wawancara dengan para informan dapat diketahui bahwa desa Bendar memiliki berbagai modal sosial yang hidup di masyarakatnya. Pola seperti ini sesungguhnya sudah lama hidup dan bersemayam dalam kearifan lokal masyarakat Bendar. Namun hal tersebut terberangus disebabkan kebijakan pembangunan yang tersentralisasi. Inisiasi lokal menjadi lumpuh, diganti penyeragaman pusat.

Berbagai modal sosial yang dimiliki masyarakat Bendar dilihat dari berbagai kacamata, yaitu modal sosial hubungannya dengan aspek ekonomi, modal sosial hubungannya dengan aspek sosial, modal sosial hubungannya dengan aspek kultural, dan juga modal sosial hubungannya dengan aspek peranan perempuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Widyono Hari M (Jamil, 2005:387), bahwa modal sosial mempunyai aspek yang luas karena kacamata yang digunakan setiap orang berbeda-beda. Menurutnya modal sosial dapat dilihat dari aspek ekonomi, politik, kultural maupun sosial.

Modal sosial dari aspek sosial adalah kuatnya sistem kekeluargaan pada masyarakat Bendar. Dengan sistem kekerabatan yang erat, kehidupan masyarakat berlangsung dengan guyub dan akrab sehingga kerjasama mudah dilaksanakan. Misalnya dalam kegiatan gotong royong desa. Kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, walaupun tidak dengan keterlibatan secara fisik tetapi menggantinya dengan uang karena kaum laki-laki lebih banyak berada di laut. Demikian juga ketika ada warga yang membutuhkan bantuan seperti, yang sakit akan dibantu sepenuhnya oleh warga yang lain. Demikian juga dalam kegiatan melaut, kerjasama antar warga masyarakat sangat erat, seperti dengan meminjamkan peralatan, maupun modal. Kerjasama dalam kegiatan perekonomian maupun sosial berlangsung dengan landasan kepercayaan. Karena itu tidak ada kekhawatiran apa yang dipinjamkan tidak kembali, atau pemilik kapal ditipu oleh nahkoda dan ABK nya.

Dari aspek kultural, nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat Bendar adalah sifat kerja keras dan keuletannya. Nilai-nilai tersebut membuat mereka pantang menyerah dalam melaut, baik dalam penggunaan sarana prasarana maupun mendapatkan hasil tangkapan. Mereka juga kreatif dengan cepat merespon perkembangan dengan memanfaatkan berbagai teknologi dalam melaut. Termasuk berani mengambil resiko dengan meminjam uang (mengutang) untuk modal berlayar. Etos kerja yang tinggi tersebut membuat mereka cepat berkembang, dan meningkat kesejahteraannya yang jarang ditemui pada nelayan-nelayan di tempat lain.

Adapun dari aspek ekonomi, modal sosial yang dimiliki masyarakat Bendar adalah terbentuknya banyak paguyuban atau lembaga perekonomian berdasarkan profesi nelayan. Ada paguyuban nelayan kapal *purseine*, kapal *cantrang*, kapal *holer*, dan kapal tradisional. Keberadaan paguyuban-paguyuban perekonomian yang menggunakan sistem bagi hasil ini sangat membantu para nelayan. Berbagai pelayanan dan fasilitas bisa didapatkan seperti peminjaman atau persewaan alat-alat penangkapan ikan sampai pinjaman modal. Fasilitas yang sangat membantu nelayan adalah *fish credit* yang memberikan talangan pinjaman modal karena pembayaran dari TPI yang menunggak. Dengan fasilitas ini para nelayan bisa melaut lagi, tidak terhambat oleh modal.

Modal sosial yang sangat mendukung bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, yang mungkin tidak terdapat di tempat lain, adalah peranan kaum perempuan yang begitu besar. Selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus rumah dan keluarga, mereka juga membantu perekonomian keluarga dengan berjualan ikan maupun mengolah hasil ikan. Mereka tidak mau bergantung pada suaminya, bahkan dari berdagang kadang hasilnya lebih banyak dari melaut. Seorang pedagang besar bisa berpenghasilan 10 juta/bulan.

Dari pembahasan tersebut dapat terlihat bahwa modal sosial di desa Bendar memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

C. PENUTUP

C.1. Simpulan

Di desa Bendar terdapat beberapa modal sosial yaitu yang **pertama** adalah modal sosial hubungannya dengan aspek sosial berupa *social trust*. **Kedua**, modal sosial hubungannya dengan aspek kultural berupa nilai-nilai kerja keras dan keuletan, kemudian **ketiga** modal sosial hubungannya dengan aspek ekonomi berupa lembaga perekonomian bentukan masyarakat yang didasarkan sistem bagi hasil. **Keempat**, modal sosial hubungannya dengan aspek peranan kaum perempuan.

Keempat modal sosial tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bendar. Modal sosial tersebut bersinergi menjadi faktor internal yang mendukung meningkatkan perekonomian mereka. Bendar pun menjadi fenomenal di tengah kehidupan nelayan yang pada umumnya miskin dan hidup serba terbatas. Bendar mampu menjadi inspirasi dan percontohan bagi nelayan dan masyarakat pada umumnya, bahwa sebenarnya kita bisa maju dan mengubah kondisi bila kita mau berusaha. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal yang berupa modal sosial tersebut sehingga dapat menggerakkan partisipasi dan memberdayakan masyarakatnya sebagaimana terlihat di Bendar. Akhirnya kemandirian desa (otonomi desa) pun dapat terwujud tanpa banyak peran serta pemerintah.

C.2. SARAN

1. Peranan modal sosial di desa Bendar lebih ditingkatkan lagi dengan pengoptimalan peran pemerintah desa dalam membimbing dan memimpin warga masyarakatnya.
2. Masyarakat harus selalu menjaga hubungan yang erat karena pengaruh teknologi modern dan globalisasi bukan tidak mungkin lama kelamaan akan menggerus keakraban dan keguyuban diantara mereka.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Madhekan, *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, Malang, Averoes, 2007
- Gunawan, Jamil, *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, Jakarta, LP3ES, 2005
- Kushandajani, *Otonomi Desa berbasis modal sosial dalam perspektif socio-legal*, Semarang, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP
- Romli, Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007
- Sahdan, Gregorius, *Transformasi Ekonomi Politik Desa*, Yogyakarta, APMD Press, 2005
- Wasistiono, Sadu, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, Fokusmedia, 2007,
- Lexi J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2002
- Ekspedisi Anjer-Panaroeakan: *Laporan Jurnalistik Kompas*, 2008, Jakarta, Kompas
- www.kompas.com
- <http://www.berita-terkini.infogate.com>
- <http://www.interseksi.org>
- USU Digital Library